PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Pendekatan Teoritis

Sri Widayanti

Abstract

Empowerment and its' theoretical debate are still interesting to discuss. Many definitions and different implementations of empowerment influenced by various paradigms make the discussion even more developed. This paper, which consists of three parts, focuses generally on theoretical analysis of how differents paradigms define and practice empowerment. The first part is preface, describing social problems and several elements that practice empowerment i.e. government, corporations and civil society. The second part disscusses the historical context where the term empowerment revealed as a respond to 'maldevelopment'. It gives explanation on how development successfully increased economic growth but not eradicating poverty or providing jobs at the speed anticipated, and in many cases, inequalities were increasing. In the last part, the analysis of different perspectives on empowerment influenced by different theories is discussed. In this case, those perspectives are classified into developmentalist perspective and anti-developmentalist.

Keywords*: Empowerment, Developmentalism*

A. Pendahuluan

Masalah sosial, terutama kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi *concern* utama pemerintah Indonesia mulai pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan sampai Orde Reformasi sekarang ini. Berbagai analisa, pendekatan dan strategi diimplementasikan untuk menghapuskan kemiskinan, tetapi sampai saat ini data masih

menunjukkan adanya pasang surut kondisi masyarakat miskin. Meskipun demikian, tidaklah kemudian hal tersebut menjadi sebuah justifikasi untuk membiarkan atau bahkan melanggengkan kemiskinan yang terjadi direpublik ini.

Pembahasan mengenai kemiskinan dan segala hal yang berkaitan dengannya mulai dari penyebab, penanggulangan dan caranya seperti tidak ada habisnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa jumlah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya sangat cukup untuk melepaskan rakyatnya dari masalah kemiskinan serta mensejahterakan mereka. Dengan seluruh kekayaan dan potensi yang dimiliki, seharusnya masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Ironisnya, kondisi masyarakat sangat berbeda dengan apa yang diidealkan. Sampai saat ini, kemiskinan justru merupakan masalah utama di tengah-tengah potensi dan kekayaan alam yang berlimpah itu.

Kenyataan tersebut memunculkan banyak pertanyaan, apakah benar bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia terutama adalah kemiskinan, atau sebenarnya adalah masalah ketidakadilan distribusi kekayaan? Bagaimana pengaruh globalisasi sistem ekonomi terhadap kemiskinan global? Faktor-faktor apa saja yang dominan dan mempengaruhi kemiskinan dan kompleksitasnya? Usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera dan berdaya? Untuk memahami permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan pemikiran dan analisis yang komprehensif.

Berkaitan dengan kondisi kemiskinan yang demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia dan negara dunia ketiga lainnya, pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Meskipun dengan cara pandang dan landasan teori yang berbeda, program pemberdayaan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai usaha untuk menyelesaikan atau paling tidak mengurangi dampak masalah sosial. Implementasi pemberdayaan masyarakat tidak sama antara satu konteks masyarakat dengan konteks masyarakat yang lain. Secara umum, pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan berbagai macam program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya; dunia usaha dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR)nya; dan OMS dengan aktivitas akar rumputnya.

Gambar 1 Pelaku Pemberdayaan Masyarakat

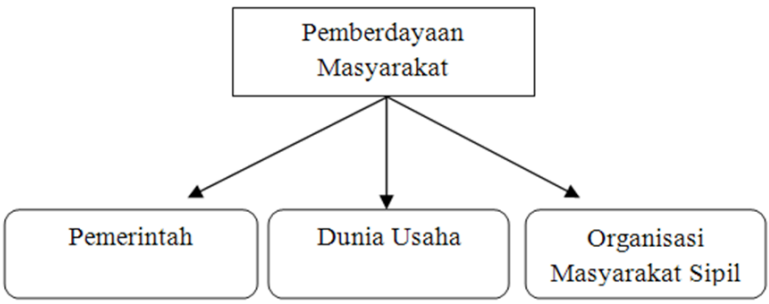

Tulisan mengenai pemberdayaan masyarakat ini akan membahas konsep pemberdayaan yang mencakup sejarah kemunculannya, perbedaan pendefinisian yang dilatarbelakangi oleh perbedaan paradigma, serta implikasinya terhadap strategi dan program pemberdayaan yang diterapkan di lapangan. Untuk mempermudah pemahaman, diakhir tulisan ini digambarkan sebuah tabel yang menjelaskan perbedaan-perbedaan yang signifikan dari paradigma dan teori yang berpengaruh terhadap pandangan mengenai pemberdayaan masyarakat ini.

B. Sejarah Kemunculan Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, phenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik *Frankfurt School*. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, *anti-establishment*, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan *civil society*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran *post-modernisme*, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.

Diawali pada akhir tahun 1960an, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan

yang lain seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang pencapaian pertumbuhan ekonominya tinggi, justru muncul masalah '*maldevelopment*'[1]. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan, bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi justru meningkat. Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52 persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran, terutama dibidang pertanian, dan peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970an benar-benar merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.

Permasalahan '*maldevelopment*' sebagaimana dijelaskan, memunculkan beberapa pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi oleh paradigma atau cara pandang yang sangat berpengaruh terhadap teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis atas realitas sosial. Teori mencakup empat fungsi dasar yaitu: penjelasan, prediksi, kontrol dan pengelolaan perubahan. Pemberdayaan masyarakat adalah praktek berdasarkan empat fungsi tersebut: menggambarkan kejadian; menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut; memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya (termasuk apa yang akan terjadi apabila dilakukan intervensi/ atau tidak dilakukan intervensi); dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat.[2]

Menurut Fakih[3], salah satu dari banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah teori adalah apa yang disebut sebagai paradigma. Pembahasan mengenai paradigma ini perlu dilakukan mengingat pentingnya pengaruh paradigma terhadap teori dan analisis atas realitas sosial, karena pada dasarnya tidak ada satu pandangan atau satu teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan bergantung terhadap paradigma yang digunakan. Thomas Kuhn dalam bukunya "*The Structure of Scientific Revolution*" menjelaskan bahwa suatu aliran ilmu lahir dan berkembang sebagai proses revolusi paradigma, dimana sutau pandangan

---

[1] Lihat John Brohman, *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development,* (Blackwell Publishers 2001), hlm 202.

[2] Bob Mullaly, *Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach* (Oxford University Press Canada, 2002), hlm. 2

[3] Lihat Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 17.

teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang baru. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan sebuah teori.

Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak ingin kita lihat, dan apa yang tidak ingin kita ketahui. Paradigma pula yang akan mempengaruhi pandangan seseorang mengenai apa yang 'adil dan tidak adil', baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial.

Dalam konteks ini, Freire[4] menjelaskan klasifikasi ideologi teori sosial yang terbagi kedalam tiga kesadaran yaitu: kesadaran magis (*magical consciousness*); kesadaran naif (*naival consciousness*); dan kesadaran kritis (*critical consciousness*). *Pertama*, kesadaran magis yaitu suatu keadaan kesadaran yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor diluar manusia, baik natural maupun supernatural. Dalam teori perubahan sosial, apabila proses analisis sebuah teori tidak mampu mengaitkan antara sebab dan musabab suatu masalah sosial, teori tersebut disebut sebagai teori sosial fatalistik. Suatu teori sosial bisa dikategorikan dalam model ini jika teori yang dimaksud tidak memberikan kemampuan analisis dan kaitan antara sistem dan struktur terhadap masalah sosial. Masyarakat secara dogmatik menerima kebenaran dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologi setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat muslim, orang yang memahami masalah sosial dengan menggunakan kesadaran magis ini akan melihat bahwa kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat merupakan takdir atau ketetapan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu apa arti dan hikmah dibalik ketentuan tersebut. Makhluk, termasuk umat Islam tidak tahu tentang gambaran besar skenario Tuhan akan perjalanan umat manusia. Bagi mereka, masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan modernisasi, bahkan sering dianggap sebagai 'ujian' atas keimanan dan kita tidak tahu manfaat dan mudaratnya, malapetaka

[4] Dalam Mansour Fakih, Ibid, hlm. 30

apa yang dibalik kemajuan dan pertumbuhan serta globalisasi bagi umat umat manusia dan lingkungan dimasa mendatang. Pandangan didasarkan pada teologi Sunni mengenai *predeterminism* atau takdir, yakni ketentuan dan rencana Tuhan jauh sebelum alam diciptakan.

Kedua, kesadaran naif, yang melihat 'aspek manusia' sebagai akar penyebab masalah dalam masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreatifitas dan '*need for achievement*' dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis kemiskinan mereka berpendapat bahwa masyarakat miskin karena kesalahan mereka sendiri, yakni karena mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya pembangunan dan seterusnya. Oleh karena itu, *man power development* adalah sebuah jalan keluar yang diharapkan dapat memicu perubahan.Teori perubahan dalam konteks ini adalah teori yang tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor *given* dan karena itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat reformatif.

Masyarakat muslim yang memiliki kesadaran ini pada dasarnya sepaham dengan pikiran modernisasi sekuler mengenai kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka percaya bahwa masalah yang dihadapi kaum miskin berakar dari persoalan karena ada yang salah dengan sikap mental, budaya, ataupun teologi mereka. Kemiskinan umat Islam tidak ada sangkut pautnya dengan menguatnya paham neloliberalisme maupun globalisasi. Mereka menyerang teologi Sunni yang dijuluki teologi fatalistik sebagai penyebabnya.

Kesadaran ini memiliki pendekatan dan analisis yang sama dengan penganut paham modernisasi sekuler yang menjadi aliran *mainstream* pembangunan. Menurut mereka, kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena mereka tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan globalisasi. Oleh karena itu, mereka cenderung melihat nilai-nilai (values) sikap mental, kreativitas, budaya dan paham teologi sebagai pokok permasalahan, dan tidak melihat struktur kelas, gender dan sosial sebagai pembentuk nasib masyarakat. Bagi mereka, umat harus berpartisipasi dan mampu bersaing dalam proses industrialisasi dan globalisasi serta proses pembangunan. Mereka tidak mempersoalkan globalisasi dan pembangunan itu sendiri sepanjang diterapkan melalui pendekatan dan metodologi yang benar, serta dikelola oleh pemerintahan

yang bersih (*clean government*).

Bagi penganut paham ini, permasalahan globalisasi lebih pada sejauh mana mereka mampu menyiapkan sumber daya manusia yang cocok dan dapat bersaing dalam sistem pasar bebas. Dalam menghadapi tantangan globalisasi kapitalisme dan menguatnya liberalisme, para intelektual muslim yang memiliki kesadaran naïf ini justru menggali ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan modernisasi dan liberalisme, melakukan penafsiran ulang atas ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mempersoalkan secara mendasar masalah yang diakibatkan oleh neoliberalisme.

Ketiga, kesadaran kritis, yaitu paradigma yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan bagaimana keterkaitan aspek-aspek tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur tersebut bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas teori sosial dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu proses dialog 'penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil'. Kesadaran ini disebut sebagai kesadaran transformatif.

Masyarakat muslim yang memiliki kesadaran ini percaya bahwa ketidakberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat muslim disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan budaya. Bagi mereka, agenda yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental lebih baik dan lebih adil dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Mereka menyadari bahwa transformasi meliputi proses panjang penciptaan ekonomi yang tidak eksploitatif, politik tanpa represi dan kultur tanpa hegemoni, serta penghargaan terhadap HAM. Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, fokus kerja kaum ini adalah mencari akar teologi, metodologi dan aksi yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial.

Keberpihakan mereka terhadap kaum miskin dan tertindas (*dhu'afa*) tidak hanya diilhami oleh sumber-sumber ajaran agama, tetapi juga didasarkan pada analisis kritis terhadap struktur yang ada. Islam bagi mereka dipahami sebagai agama pembebasan bagi yang tertindas, serta mentransformasikan sistem eksploitasi menjadi sistem yang adil. Globalisasi, serta berbagai

proyek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadi salah satu penyebab yang memiskinkan, memarginalisasi dan mengalienasi masyarakat. Selain usaha praktis untuk membantu memecahkan persoalan ekonomi, politik, dan budaya keseharian melalui proyek-proyek pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, mereka juga mengaitkannya dengan melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Negara baik di level nasional maupun lokal yang memarginalkan kaum miskin dan pinggiran.

C. Pendefinisian Pemberdayaan Masyarakat

Berangkat dari pemetaan paradigma tersebut, secara garis besar berbagai pandangan dan definisi mengenai pemberdayaan dapat dikelompokkan kedalam dua aliran. *Pertama*, adalah pandangan yang berkembang dikalangan para aktivis sosial pada tahun 1970an, yang pada waktu itu sebagian besar menganut kerangka kerja *developmentalisme*. Aliran ini didasari oleh kesadaran naif atau refomatif, yang melihat faktor manusia sebagai akar masalah ketidakberdayaan mereka. Dalam konteks ini, mereka tidak menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan, tetapi lebih kepada mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan, seperti mempermasalahkan pendekatan *'bottom up'* versus pendekatan *'top down'*. Maka, masalah yang dianggap strategis adalah menemukan metodologi yang lebih baik dari proyek-proyek pemerintah. Sehingga, pendekatan *bottom up* dan partisipasi menjadi isu sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Menurut mereka, kegagalan pembangunan disebabkan oleh pendekatan konvensional yang diantaranya adalah *transplantative planning*, *top down*, *inductive*, *capital intensive*, *west-biased technological transfer*, dan sejenisnya. Kurang tepatnya pemilihan strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakat telah menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut :

1. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan *(the development of underdevelopment)*.
2. Melahirkan ketergantungan *(dependency)* negara sedang berkembang terhadap negara maju.
3. Melahirkan ketergantungan *(dependency) pheriphery* terhadap *center.*
4. Melahirkan ketergantungan *(dependency)* masyarakat terhadap negara/ pemerintah.
5. Melahirkan ketergantungan *(dependency)* masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dll.) terhadap pemilik modal.

Oleh karena itu, solusi yang mereka tawarkan adalah mengupayakan teknik dan metodologi 'alternatif' dari metode dan pendekatan proyek-proyek pemerintah, seperti proyek pengembangan industri kecil; pengembangan kerajinan (*handycraft*); proyek peningkatan pendapatan; pelayanan kesehatan masyarakat; program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; teknologi tepat guna dan proyek pembangunan perdesaan lainnya. Strategi-strategi yang mereka tawarkan adalah *transformative and transactive planning*, *bottom up, community empowerment,* dan *participative,* semuanya ini terkenal dengan Pembangunan Komunitas (*Community Development*).

Perbedaan cara pandang atas persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pembangunan antara kelompok pendukung pembangunan (developmentalisme) dengan kelompok anti-developmentalisme pada gilirannya memunculkan pemaknaan yang berbeda tentang konsep pemberdayaan. Kaum developmentalisme dengan metode alternatifnya memunculkan konsep *community development* dengan salah satu strateginya yaitu *community empowerment*. Jelas bahwa istilah empowerment (yang diyakini oleh kaum anti-developmentalisme sebagai anti-thesis terhadap konsep pembangunan) juga digunakan oleh kelompok yang mendukung pembangunan (developmentalism). Namun pada penjelasan selanjutnya penulis akan memaparkan perbedaan yang signifikan antara konsep pemberdayaan menurut kaum developmentalism dan mereka yang menentang konsep developmentalisme (pendukung anti-developmentalism).

Berikut adalah berbagai definisi mengenai pemberdayaan masyarakat dari kelompok pendukung aliran developmentalisme:

a. Adams[5] dari Kamus Pekerjaan Sosial: " *the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services*." Berdasarkan definisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.
b. Surjono&Nugroho[6], pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian

[5] Lihat Robert Adams, *Social Work and Empowerment.* 3rd ed.(New York: Palgrave Macmillan, 2003)

[6] Lihat Agus Surjono, & Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah,* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)

dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Model-model pemberdayaan: *People Centre Development* (i.e. IDT, Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan,dll.

c. Wrihatnolo&Nugroho[7], konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Menurut kelompok pertama ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang sebelumnya adalah 'korban' pembangunan menjadi 'pelaku' pembangunan. Kelompok ini beranggapan bahwa kegagalan pembangunan terjadi karena pendekatan konvensional yang diterapkan diantaranya adalah *transplantative planning*, *top down*, *inductive*, *capital intensive*, *west-biased technological transfer*, dan sejenisnya. Oleh karena itu, muncul konsep-konsep baru pemberdayaan diantaranya adalah *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Pandangan yang *kedua* adalah anti-developmentalisme yang mulai berkembang pada tahun 1980an, yang mempertanyakan gagasan dasar dari diskursus pembangunan. Pandangan ini menggunakan pendekatan kritis sebagai landasan dan alat analisa atas realitas sosial. Kritik atas pembangunan ini mengundang banyak kajian yang diantara hasilnya menunjukkan bahwa modernisasi dan developmentalisme adalah bungkus baru dari kapitalisme. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa ideologi pembangunan atau developmentalisme adalah salah satu produk dari proyek pencerahan (*enlightenment*), yang memiliki prinsip dasar penduniawian (sekularisasi); penalaran (rasionalisasi); dan individualisasi. Ketiga landasan tersebut mendorong dilakukannya revolusi industri, revolusi ilmu pengetahuan, dan reformasi politik.[8]

---

[7] Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)

[8] Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). *Pemberdayaan:*

Dengan landasan sekularisasi, proses desakralisasi dalam kiprah kehidupan manusia diselenggarakan sehingga dominasi lembaga dan ajaran agama ditepiskan, sehingga manusia kemudian 'dibebaskan' dari belenggu dogma-dogma dengan segala ramifikasinya (cabang-cabangnya). Landasan rasionalisasi telah mengubah wacana dan kiprah manusia yang semula hanya berwawasan pada kepercayaan menjadi wacana yang berwawasan pada penalaran. Dengan rasionalisasi kehidupan, maka eksplorasi tanpa batas terhadap alam oleh manusia melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dihalalkan. Alam tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menyatu dengan kehidupan manusia, yaitu sebagai salah satu warga "komunitas wujud" atau yang disebut *the community of being*, sebagaimana keyakinan yang dianut oleh masyarakat tradisional. Alam dipahami sebagai objek diluar manusia yang harus ditaklukkan. Manusia yang dalam pandangan masyarakat tradisional merupakan bagian dari komunitas wujud, kendati dianggap yang termulia, kini mengklaim dirinya sebagai pusat segalanya. Mereka bahkan menganggap apa yang diluar dirinya atau yang diluar pemahaman rasionalnya sebagai sekedar mitos-mitos. Manusia pencerahan, dengan demikian, menuntut sebuah kesempurnaan bagi dirinya tanpa ketergantungan dengan yang ada diluar dirinya, dewa, Tuhan atau siapapun.

Ide kemajuan adalah akar dari modernitas yang memiliki ciri-ciri rasionalitas, kemajuan dan kebebasan manusia. Sedangkan modernisasi adalah proses perubahan yang harus dilakukan untuk mencapai masyarakat modern. Ide modernitas identik dengan kapitalisme, yang mengusung kemajuan dan kemodernan. Ekspansi kapitalisme dilakukan dengan kolonialisme atau penaklukan daerah baru dengan memperkenalkan istilah peradaban baru. Asumsi mereka adalah ide kemajuan/progress hanya dimiliki oleh mereka, dan harus ditularkan kepada masyarakat yang dianggap tidak mempunyai ide tentang progress.

Ketika kolonialisme hancur, ide kemajuan mengambil bentuk lain yaitu ideologi pembangunan yang sangat bias terhadap kapitalisme. Ideologi pembangunan menjadi sangat dominan mulai dekade 50an sampai dengan 70an. Ideologi pembangunan sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan ekspansi kapitalisme global. Asumsi yang menempatkan manusia sebagai *center of being* berakibat langsung pada eksploitasi alam tanpa batas. Sifat eksploitatif ini kemudian melahirkan egosentrisme dan kekerasan. Akibat selanjutnya adalah munculnya budaya konsumerisme yaitu pemenuhan

---

Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996); lihat juga A.S. Hikam, "Kekerasan Negara, Militer, Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia", dalam Suaedy, ed. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000).

keinginan yang tak terbatas. Akhirnya, terjadi peningkatan kriminalitas, dekadensi moral, kerusakan lingkungan, pemiskinan massal, dan hegemoni budaya.

Menurut pandangan ini, pembangunan dilihat sebagai ideologi dominan yang telah mengendap sekian lama di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak memungkinkan bagi pencapaian demokratisasi dan transformasi dibidang apapun yang meliputi ekonomi, politik, kultur, gender, dan lingkungan, termasuk relasi pengetahuan/kekuasaan[9]. Dari perspektif ini, maka kritik dan penolakan bukan hanya pada aras metodologi dan pendekatan tetapi juga terhadap konsep dan diskursus pembangunan.

Sedangkan kelompok kedua (anti-developmentalisme) mendefinisikan pemberdayaan diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut John Friedman (1992)[10], Pemberdayaan dapat diartikan sebagai *alternative development,* yang menghendaki *'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equaty.*"
b. Jim Ife[11] membagi pandangan pemberdayaan ke dalam beberapa kelompok: *pertama*, penganut strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang opresif; *kedua*, kelompok pluralis memandang pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu '*rule ofthe game*' tertentu; *ketiga*, kelompok elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis; dan keempat, kelompok post-strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.
c. Menurut Pranarka[12], konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi

---

[9] Lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

[10] Dalam Ginanjar K., *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijaksanaan, dan Penerapan,* (1997:55)

[11] Jim Ife, *Rethinking Social Work towards Critical Parctice*, (Longman, 1997), dapat juga dilihat di Jim Ife & Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

[12] Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi,* (Jakarta: CSIS, 1996)

semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Konsep pemberdayaan yang diusung oleh anti-developmentalisme tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pembebasan dari determinisme dan kekuasaan yang absolut, dengan mendasarkan pada aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemberdayaan bukanlah sebuah istilah yang netral, tetapi memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat *grass-root* yang menjadi pihak yang dirugikan dalam relasi sistem dominan-subordinat. Perbedaan yang sangat signifikan dari kedua pandangan tersebut adalah pada sasaran utama pemeberdayaan, apabila aliran pertama menekankan pada perubahan manusia supaya dapat menyesuaikan dengan sistem, aliran kedua justru menekankan pada perubahan sistem dan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang lebih adil dan lebih baik sehingga dengan sendirinya masyakat akan berdaya dari determinisme kekuasaan yang absolut.

Tabel berikut ini menggambarkan perbedaan pandang mengenai pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh kelompok pendukung Developmentalisme dan kelompok pendukung Anti-Developmentalisme.

Tabel 1
Pandangan tentang Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Pemberdayaan	Developmentalisme	Anti-Developmentalisme
Definisi	Dekonsentrasi kekuatan; kesadaran politis; memperbesar akses terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan (partisipasi)	Upaya pembebasan dari determinisme dan kekuasaan absolut (liberasi)
Sasaran	Merubah korban (victim) menjadi pelaku (actor) pembangunan; meningkatkan partisipasi masyarakat	Menciptakan sistem dan struktur politik, ekonomi dan budaya yang lebih adil
Strategi	People Centered Development; Community Based Development; Community Driven Development	Conscientization; Popular Education

Program	Inpres Desa Tertinggal (IDT); Bantuan langsung Tunai (BLT); program Kemitraan; Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dll.	Pendidikan penyadaran; menciptakan sistem ekonomi alternatif; serikat buruh, dll.
Indikator	Kemandirian; Partisipasi	Terbangunnya kesadaran kritis; terciptanya struktur politik tanpa represi, ekonomi tanpa eksploitasi dan budaya tanpa hegemoni

Sebagai kesimpulan, mengutip pendapat Mansour Fakih[13] yang mengatakan bahwa pada dasarnya, memahami cara pandang atau paradigma bertujuan untuk menegakkan komitmen untuk suatu proses emansipasi, keadilan sosial dan transformasi sosial. Masalah memilih suatu paradigma dan teori sebagai alat analisa bukanlah pada persoalan benar atau salahnya teori tersebut, tetapi lebih karena dikaitkan dengan persoalan teori mana yang akan berakibat pada penciptaan emansipasi dan penciptaan hubungan-hubungan dan struktur yang secara mendasar lebih baik. Oleh karena itu, memilih paradigma dan teori perubahan sosial adalah suatu bentuk keberpihakan dan berdasarkan nilai-nilai tertentu yang dianut. Pertanyaan selanjutnya adalah bukanlah apakah kita harus memihak atau tidak karena keberpihakan adalah mustahil untuk dapat dihindarkan bagi semua teori perubahan sosial, tetapi masalahnya adalah kepada siapa atau kepada apa keberpihakan tersebut ditujukan.

[13] Lihat Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan*.

Daftar Pustaka

Adams, Robert. 2003. *Social Work and Empowerment*. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan.

Afandi, Muhrisun, dkk (eds.). 2005. *Interdisciplinary Approaches to Social Work*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Awang, San Afri, dkk. 1996. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bappenas.

Brohman, John. 2001. *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*. Blackwell Publishers.

Chomsky, Noam. 2005. *Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tatanan Global*. Jakarta: Profetik.

Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____, 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (edisi 3). Yogyakarta: INSIST-Pustaka Pelajar.

_____, 2002. *Jalan lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan INSIST Press.

_____, 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ife, Jim. 1997. *Rethinking Social Work towards Critical Parctice*. Longman.

Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*: *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mullaly, Bob. 1997. *Challenging Oppression: a Critical Approach to Social Work*. Oxford University Press.

_____,2002. *Structural Social Work: Ideology, Theory and Practice*. Oxford University Press Canada.

_____, 2007. The New Structural Social Work (3rd edition). Oxford University Press Canada.

Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta: Kelompok Gramedia.

Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Seabrook, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global; Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resist Book.

Suaedy, Ahmad (ed). 2000. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: PT Gramedia.

Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wrihatnolo, Randy R.& Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sri Widayanti adalah Staf di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Kemensos RI